

DAKWAH DAN NEGARA

Taqwa

Dosen Ilmu Dakwah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bone

E-mail: el_taqwa@yahoo.co.id

Abstrak:

Dakwah dalam arti ajakan kepada kebaikan merupakan kewajiban. Tetapi dalam mewujudkan kewajiban tersebut, setiap orang memerlukan jaminan stabilitas dan undang-undang Negara. Berdasarkan hubungan tersebut, artikel ini ingin melihat bagaimana Negara secara politis memberikan ruang bagi kegiatan dakwah dan bagaimana kegiatan dakwah mendukung cita-cita luhur Negara. Melalui pendekatan sosiologis dan politik, artikel ini menganalisis hubungan yang saling menguntungkan jika kegiatan dakwah dilindungi oleh Negara dan pencapaian tujuan bernegara disuarakan melalui kegiatan dakwah. Berdasarkan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa sikap inklusifisme merupakan titik temu yang harus mempertemukan dakwah dan Negara dalam suatu misi yang amat mulia. Dakwah dilakukan harus berwawasan inklusif dan sebaliknya, Negara harus juga menjunjung tinggi inklusifisme agar segala bentuk ajakan kepada kebaikan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu atau melegitimasi hanya paham tertentu saja.

Key Words:

Dakwah, Negara, Inklusifisme, Umat

I. Pendahuluan

Hubungan Islam dengan politik sudah sering dibicarakan dalam berbagai kesempatan. Hubungan keduanya sering kali digambarkan sebagai dua sisi dari satu mata uang, demikian eratnya dan tak mungkin dipisahkan. Di luar Islam, hubungan tersebut memang dijumpai. Imperium Romawi Suci dan Kerajaan Sriwijaya pada masa lampau adalah contoh penyatuan antara agama dan negara dari masing-masing umat Kristen dan Hindu dalam bentuk modern, penyatuan itu dapat dicontohkan pada kenyataan bahwa kepala Negara Kerajaan Inggris adalah juga kepala Gereja Anglika, negara Amerika Serikat, dari sudut analisis tertentu, misalnya dari kerangka sosiologi agama dapat disebut sebagai "Negara" yang mengaku dan menghirup nilai-nilai agama dalam hal ini Kristen Protestan, aliran Puritanisme.¹

Eratnya kaitan antara Islam dan politik segala tampak pada saat nabi Muhammad wafat dan masa-masa sesudahnya. Pertautan yang erat antara Islam dan politik digambarkan oleh Hamid Enayat, dengan menunjuk pertemuan yang

¹ Dewantara Raharjo, *Mewujudkan Satu Ummat* (Cet. I; ttp.: Pustaka Cidesindo, 2000), h. 41.

segera dilakukan kalangan Sahabat Nabi segera setelah Nabi wafat untuk menetapkan pengganti beliau.²

Bila kaitan antara Islam dan politik/Negara demikian erat, dikemukakan pertanyaan, apakah dakwah sebagai salah satu aspek Islam juga berkaitan dengan agama.

II. Pengertian Subtansi Dakwah dan Negara

Kesadaran berdakwah lahir dari dorongan wahyu yang diterima kaum muslimin baik di Mekah maupun Madinah pada masa paling dini Islam. Dorongan itu tergambar ketika Al-Qur'an melukiskan umat sebagai "umat penengah" dan umat sebagai "saksi terhadap umat manusia" (Q.S. al-Baqarah/2: 143).

Beberapa ayat Al-Qur'an lainnya masih dapat dirujuk untuk menunjukkan dorongan wahyu yang demikian kuat supaya umat melakukan dakwah. Dari ayat dirujuk, tampak subtansi dakwah yang dikehendaki wahyu, yaitu ajakan kepada al-khayr, al-ma'ruf, al-haq, penghindaran dari al-munkar, serta saling menasehati atau mengingatkan terhadap hal-hal positif dan menjauhi hal-hal negative. Subtansi dakwah demikian itu seringkali secara mudah secara mudah dikatakan "seruan kepada Islam".

Adapun negara, merupakan integrasi dari kekuatan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu, baik oleh individu golongan atau asosiasi maupun oleh Negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.³

Dari keterangan singkat di atas, kini dapat dilihat hubungan dakwah dengan Negara. Negara berbicara mengenai susunan dan bentuk dalam masyarakat yang diinginkan, maka ajaran dakwah kepada al-khair, al-ma'ruf, al-haq, sikap dan perilaku positif, dan ajakannya untuk mencegah dan meninggalkan al-munkar serta perilaku negatif dapat menjadi warna atau isi dari susunan dan bentuk masyarakat yang diinginkan itu. Di sini, hubungan dakwah dan negara/politik tampak saling mengisi.

III. Hubungan Antara Dakwah dan Negara

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa Islam adalah agama untuk semua manusia, bahkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebenarnya

²J. Suyuthi Palungan, *Fiqh suyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 72.

³ Nurcholish Madjid, "Agama dan Negara Islam Sebuah Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni" *Makalah seri ke-55* (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 1991), h. 4.

dalam pikiran sederhana dapat dipahami bahwa agama datang ke tengah manusia untuk menciptakan kehidupan yang baik, benar dan harmoni. Bila dalam kenyataannya suatu agama merusak tatanan kehidupan yang demikian, maka dalam pikiran yang sederhana pula dapat dikatakan agama tersebut telah meninggalkan fungsinya. Menurut hemat penulis, tidak satupun agama yang menyalahi fungsinya seperti itu, yang ada adalah kesalahan atau kekeliruan penganutnya. Penganut yang dimaksud disini boleh pada tingkat tokoh dan pemuka agama. Bahkan bisa lebih fatal lagi apabila kekeliruan pemahaman itu diiringi dengan sikap fanatisme yang kuat.

Dengan pendekatan yang lebih konprehensif, doktrin agama terkesan "sunnat", padahal sebenarnya tidak. Sebab, yang terjadi adalah redefenisi terhadap doktrin, segera setelah agama dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan sosial. Redefenisi doktrin tersebut tetap berdasarkan pada teks wahyu dan tradisi Nabi SAW. proses demikian akan berlangsung terus, tidak mungkin dihentikan. Sebab, yang tidak berubah hanya teks wahyu sedang pemahaman terhadap wahyu akan terus berkembang.

Menyadari hal yang diuraikan di atas, dakwah harus lebih cerdas menangkap aspek Islam yang berlaku abadi dan sesuai dengan kenyataan fitrah kemanusiaan. Dengan kata lain, aspek tersebut biasa disebut universalisme dan inklusifisme Islam. Dengan pernyataan akhir ini, dipahami adanya aspek lokalitas atau temporal Islam disamping universalitasnya, begitu juga dipahami adanya kemungkinan munculnya eksklusifisme Islam sebagai lawan dari inklusifismenya. Cukup kiranya jika ditegaskan disini bahwa redefenisi yang disinggung sebelumnya, ditujukan kepada aspek lokalitas atau temporal Islam. Hanya saja harus disadari bahwa universalisme Islam dapat menjadi kenyataan bila redefenisi terhadap aspek lokalitas dan temporalnya dilakukan dengan berani dan sungguh-sungguh (ijtihad). Tanpa keberanian dan kesungguhan melakukan redefinisi demikian, dakwah hanya akan terpinggirkan dari arena dinamika sosial yang selalu bergerak dan berubah.

Selain itu, dan seperti universalisme Islam, inklusifisme Islam merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan sama sekali oleh dakwah. Inklusifisme Islam sudah mulai sejak dari ajaran keimanan, yang diantaranya adalah kewajiban mengaku banyak rasul Allah dan kitab-kitab yang mereka bawah. Keunggulan dakwah Islam pada masa-masa awal terletak pada inklusif. Kesadaran mereka akan inklusifisme Islam menjadikan mereka begitu toleran kepada kelompok-kelompok dan suku bangsa di luar mereka. Bertrand Russel menyatakan kekagumannya terhadap sejumlah kecil ahli perang Arab pada masa lampau yang sanggup memerintah wilayah baru yang begitu luas dengan tingkat keragaman kemajuan duniawi penduduknya yang bermacam-macam, itu hanya sikap toleransi muslim Arabitu demikian besar. Russel juga menyatakan Islam sebagai agama yang mengajarkan faham ketauhidan yang amat simpel, tidak seruwet teologi trinitas dan faham inkarnasi.⁴

⁴ Fazlur Rahman, "Prinsip Syura dan Peranan Ummat dalam Islam" terjemahan erna Hadi, dalam Ilyas Hasan (ed.), *Masalah-Masalah Teori dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1993), h. 102.

Pernyataan Russel itu menunjukkan bahwa orang-orang muslim pada masa permulaan Islam, memahami Islam demikian universal dan inklusif, Islam untuk semua manusia dan terbuka bagi seluruh manusia dengan kemajuannya.

Generasi muslim terdahulu tersebut melaksanakan dengan baik semasa wahyu menyangkut universalisme dan inklusifisme Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengandung semangat demikian itu diantaranya (Q.S. al-Baqarah/2: 62).

Sekalipun kaum muslim mengaku dan menghormati Nabi dan Rasul, namun eksklusifisme keagamaan yang juga terdapat di dalam diri kaum muslim telah merusak citra mereka tidak saja dari segi dakwah, tetapi juga berlawanan dengan inklusifisme wahyu sebagaimana tertera di atas. Klaim macam itu, seperti telah disinggung adalah kekeliruan sejarah yang buat manusia karena ketidakmampuan di dalam memahami wahyu, atau campur tangan mereka pada teks-teks wahyu".⁵

Sementara itu, pemahaman ummat Islam terhadap ajaran ummat Islam dan kaitannya dalam pemerintahan/negara, paling tidak terdapat tiga aliran, aliran pertama, berpendirian bahwa Islam bukan semata-mata Agama dalam pandangan barat. Menurutnya agama hanya mengurus hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Akan tetapi agama (Islam) adalah agama yang mengadung ajaran yang integratif dan mengatur kehidupan manusia dan segala aspeknya termasuk prinsip-prinsip umum tentang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aliran kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam perspektif barat. Menurutnya agama tidak mempunyai hubungan masalah-masalah ketatanegaraan. Aliran ini berpendapat Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa, sebagaimana halnya dengan rasul-rasul lainnya (sebelumnya). Aliran ketiga, adalah aliran yang menolak kedua aliran tersebut. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan, akan tetapi terdapat seperangkat tata etika bagi kehidupan bernegara.⁶

Dengan demikian dapat dilihat, dakwah dan negara /politik berbeda di dalam pengembangan universalisme dan inklusifisme agama dan perbedaan perspektif tujuan masing-masing. Adapun yang sama dari keduanya ialah, bila orang-orang di belakang dakwah (pemuka agama atau da'i) dan orang-orang di belakang negara/politik (politik dan pemerintah), tidak memahami universalisme dan inklusifisme agama. Maka dari mereka akan lahir sikap yang bertentangan dengan universalisme dan inklusifisme.⁷ Tetapi bila pemuka agama dan da'i memahami dengan baik watak universal dan inklusif dari agama yang benar. Dakwah dan pemerintahan, sekalipun mereka memahami watak yang benar tersebut namun universalisme dan inklusifisme agama mungkin disikapi menurut kepentingan negara/politik yang diemban. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan

⁵ Ibid, h. 14.

⁶ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought* (London: Macmillan Press, 1982), 124.

⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Cet. I. Jakarta; Paramadina, 1995), h. 18., baca juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata-tata Negara. Ajaran Sejarah dan Pemikirannya* (Cet. V; Jakarta: UI Press. 1993), h. 98.

politik pemerintahan bisa menyampaikan negara/politik mereka demi mendahulukan /mengakomodasi kepentingan univalisme dan inklusifisme agama karena melihat keduanya watak agama itu sebagai kebenaran ilahi. Dalam hal politik dan pemerintahan bersikap demikian maka dakwah memperoleh iklim yang kondusif untuk berkembang lebih baik; disini tampak hubungan dakwah dan negara/politik adalah hubungan saling mendukung.

IV. Penutup

Dakwah hendaknya memperhatikan watak agama yang diserukannya, watak yang berdimensi beragama yang sejuk dan tegas. Bila watak agama itu tidak mendapat perhatian bagi pengembang dakwah, maka dakwah bisa berubah wajah menjadi pemberi legitimasi kepada sesuatu yang merugikan manusia. Dalam hal ini, kita melihat hubungan dakwah dan negara dalam bentuk yang satu bisa memberi legitimasi kepada yang lain, bisa pula mengambil posisi yang berhadapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Enayat, Hamid, *Modern Islamic Political Thought*. London: Macmillan Press, 1982.
- Madjid, Nurcholish, "Agama dan Negara Islam Sebuah Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni" *Makalah seri ke-55*. Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 1991.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Cet. F. Jakarta; Paramadina, 1995.
- Palungan, J. Suyuthi, *Fiqh suyasah; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Raharjo, M. Dewantara, *Mewujudkan Satu Ummat*. Cet. I; ttp.: Pustaka Cidesindo, 2000.
- Rahman, Fazlur, "Prinsip Syura dan Peranan Ummat dalam Islam" terjemahan Erna Hadi, dalam Ilyas Hasan (ed.), *Masalah-Masalah Teori dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata-tata Negara. Ajaran Sejarah dan Pemikirannya*. Cet. V; Jakarta: UI Press, 1993.
- Ubaidillah A. et. al. *Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Cet. I: Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.